LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO

Jalan RA Basuni Nomor 17 Sooko Mojokerto, 61361

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAF	R ISI	i
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1.Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan	
	Masyarakat	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	2
BAB II	PENGUMPULAN DATA SKM	
	2.1. Pelaksanaan SKM	4
	2.2. Metode Pengumpulan Data	4
	2.3. Lokasi Pengumpulan Data	5
	2.4. Waktu Pelaksanaan SKM	5
	2.5. Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	
	3.1 Jumlah Responden SKM	7
	3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat	8
BAB IV	ANALISIS HASIL SKM	
	4.1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan	
	Unsur Layanan	9
	4.2. Rencana Tindak Lanjut	9
	4.3. Tren Nilai SKM	10
BAB V	KESIMPULAN	11
LAMPIR	AN	12
1.	Kuisioner	12
2.	Hasil Pengolahan Data	16
	Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM	
4.	Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Pada	
	Periode Sebelumnya	20

BAB I PENDAHULUUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman PenyusunanSurvei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Timur, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan pengujian sampel hewan dan bahan asal hewan yang telah diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:

- 1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik:
- 3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- 4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

- 1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- 2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
 - Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- 3. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- 5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan menyediakan Stiker barcode SuKMa-e Jatim di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan Scan Barcode SuKMa-e Jatim yang sudah disediakan di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang bisa langsung di scan pada ponsel pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yaitu:

a. Persyaratan

syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

b. Sistem, mekanisme dan prosedur

Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

c. Waktu penyelesaian

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

d. Biaya/tarif

Besaran uang yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

e. Produk spesifikasi jenis pelayanan

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

f. Kompetensi pelaksana

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

g. Perilaku Pelaksana

Sikap petugas dalam memberikan pelayanan

h. Penangan pengaduan, saran dan masukan

Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

i. Sarana dan prasarana

Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alatdalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yangmerupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

.

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. Pengisian kuisioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dengan cara melakukan pengisian mandiri.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dilakukan secara berkala setiap semester selama 6 (enam) bulan. Penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat Semester I dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari
1.	Persiapan	Januari	5
2.	Pengumpulan Data	Januari - November	192
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	November	12
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	November-Desember	15

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto baik perorangan maupun unit. Penerima layanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan adalah sebanyak 438 orang.

BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

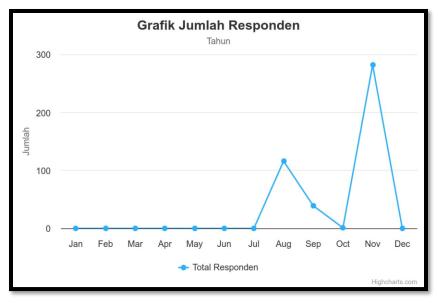
3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 438 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Karakteristik Responden SKM

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki	340	78%
	Perempuan		98	22%
	Jumlah Respon	438	100%	

Sumber data: https://sukma.jatimprov.go.id/login



Sumber data: https://sukma.jatimrov.go.id/login

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai IKM		Nilai Unsur Pelayanan							
	U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8						U8	U9	
IKM per unsur	3,37	3,38	3,34	3,81	3,34	3,44	3,49	3,89	3,3
Kategori	В	В	В	Α	В	В	В	Α	В
IKM Unit Layanan		86,23 (B atau Baik)							

Sumber data: https://sukma.jatimprov.go.id/login

Tabel 3. Grafik IKM per Unsur



Sumber data: https://sukma.jatimprov.go.id/login

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

- 1. Tiga unsur yang mendapat nilai terendah yaitu:
 - a. Waktu penyelesaian dengan nilai 3,34
 - b. Produk Pelayanan dengan nilai 3,34
 - c. Sarana dan prasarana dengan nilai 3,3
- 2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu:
 - a. Pengaduan dengan nilai 3,89
 - b. Biaya Tarif dengan nilai 3,81
 - c. Perilaku Pelaksanaan dengan nilai 3,49

Unsur standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto selama Januari 2024 s/d Desember 2024 dengan nilai kepuasan tertinggi dengan kategori **Baik.**

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto serta dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik maka perlu disusun rencana aksi untuk perbaikan unsur pelayanan dengan nilai yang paling rendah.

Penentuan perbaikan direncanakan dalam jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam table berikut:

Tabel 3. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil SKM

	Prioritas				Waktu			
No	Unsur	Program/Kegiatan		TW II	TW	TW IV		
1	Waktu penyelesaian	Mereview SOP			V		Dinas Pertanian	
2	Produk Pelayanan	Mereview SOP			1		Dinas Pertanian	
3	Sarana dan prasarana	yanan Mereview SOP			√ 		Dinas Pertanian	

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

BAB V HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Januari sampai dengan Juni 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

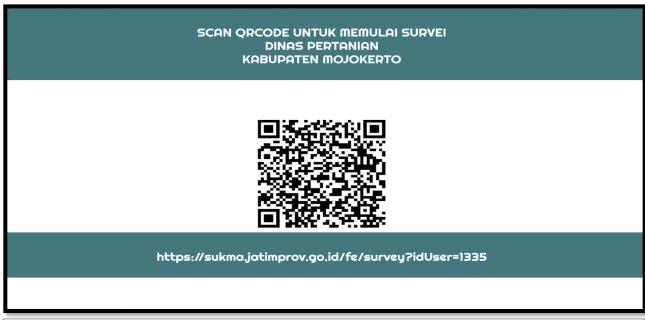
- Pelaksanaan pelayanan publik periode Januari sampai dengan Desember di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang B (Baik) dengan nilai SKM 86,23 dengan jumlah responden 438 orang. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Waktu Penyelesaian, Produk Pelayanan dan Sarana dan prasarana.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur tertinggi adalah Pengaduan dengan nilai 3,89, Biaya Tarif dengan nilai 3,81 dan Perilaku Pelaksanaan dengan nilai 3,49.

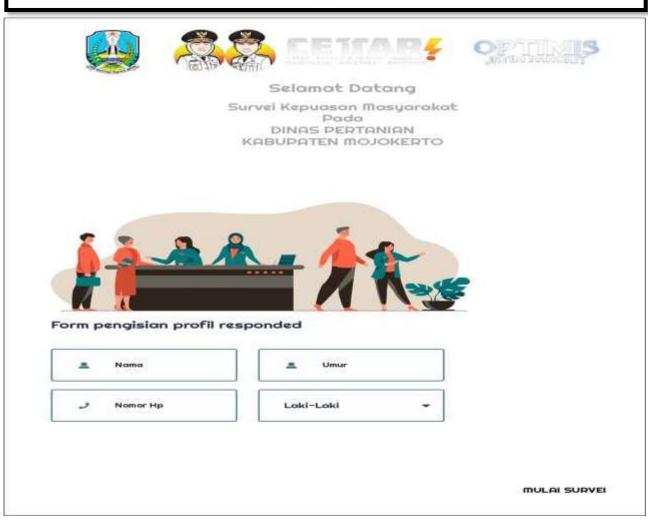
Mojokerto, Desember 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO

Pembina Tingkat I NIP. 19700820 199201 1 002

LAMPIRAN 1. KUISIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO













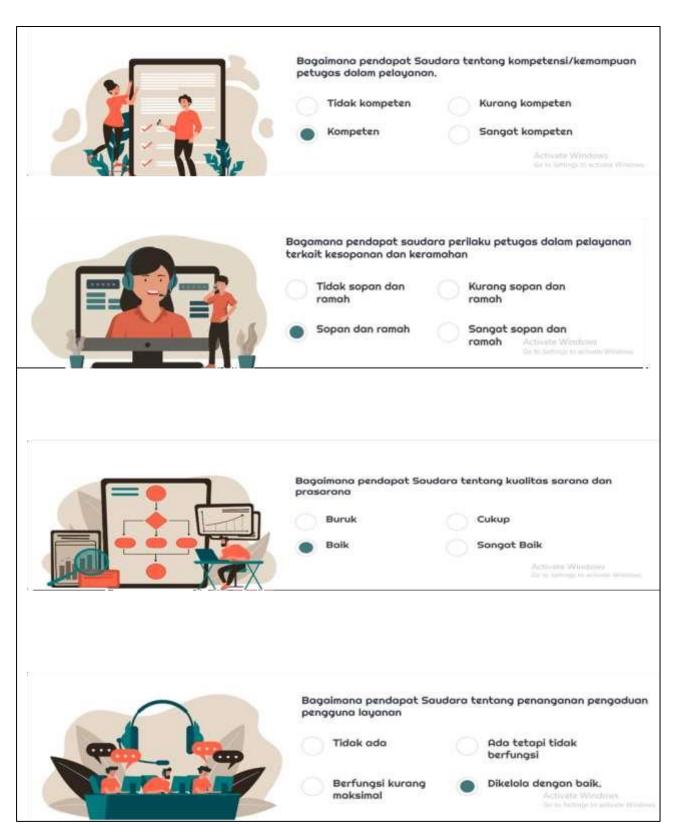
Selamat Datang

Survei Kepuasan Masyarakat Pada DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO

Ī		
	Bagaimana pendapat Si pelayanan dengan jenis	oudara tentang kesesualan persyaratan pelayanannya.
0	Tidak sesual.	Kurang sesual.
1	Sesuoi.	Sangat sesuai,
		Activate Windows
	Bagaimana pemahaman pelayanan di unit ini.	Soudara tentang kemudahan prosedur
	Tidak mudah.	Kurang mudah.
	Mudah.	Sangat mudah.
		Activate Windows
Je de	Bagaimana pendapat Sa memberikan pelayanan.	udora tentang kecepatan waktu dalam
ALCO DE LO	Tidak cepat.	Kurang cepat.
	Cepat.	Sangat cepat.
SIMIL AV KANA		Activate Windows
	Bagaimana pendapat S dalam pelayanan,	iaudara tentang kewajaran biaya/tarif
	Sangat mahal	Cukup mahal
	Murah	Grotis
	2	Activate Windows
		audara tentang kesesualan produk tercantum dalam standar pelayanan ikan,
	Tidok sesual	Kurang sesual
	Sesuoi	Sangat sesual
		Size to Settings of automorphisms

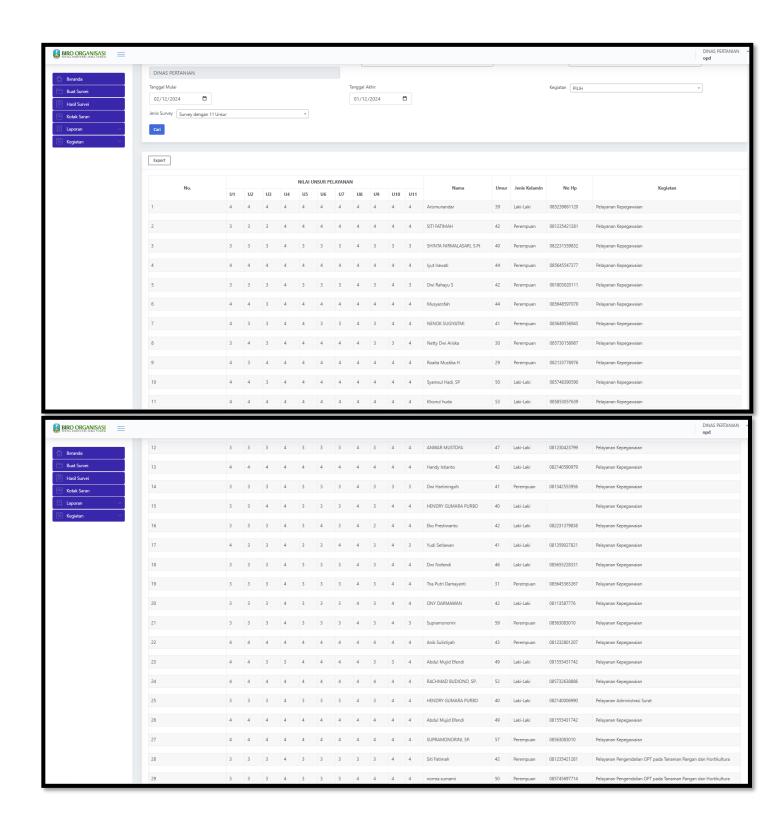
23	Bagaimana pendapat Sa pelayanan dengan jenis p Tidak sesuai. Sesuai.	kurang kesesuaian persyaratan pelayanannya. Kurang sesuai. Sangat sesuai.
	Bagoimana pemahaman S pelayanan di unit ini, Tidak mudah. Mudah.	Kurang mudah. Sangat mudah.
	Bagaimana pendapat Saumemberikan pelayanan. Tidak cepat. Cepat.	Kurang cepat, Sangat cepat, Activate Windows
	Bagaimana pendapat Si dalam pelayanan. Sangat mahal Murah	Cukup mahal Gratis
	Bagaimana pendapat Sa pelayanan antara yang t dengan hasil yang diberil Tidak sesuai	udara tentang kesesualan produk ercantum dalam standar pelayanan kan. Kurang sesual Sangat sesual

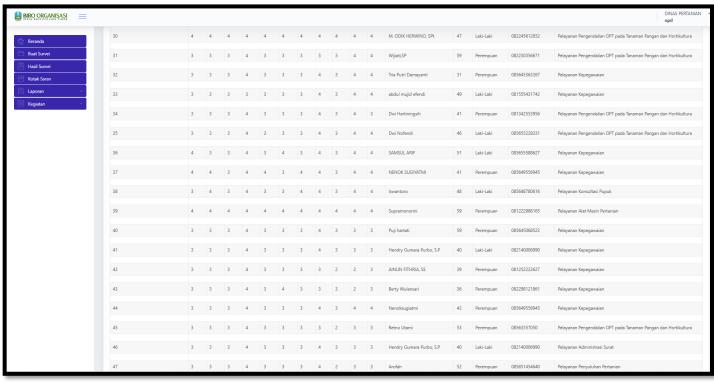
Γ

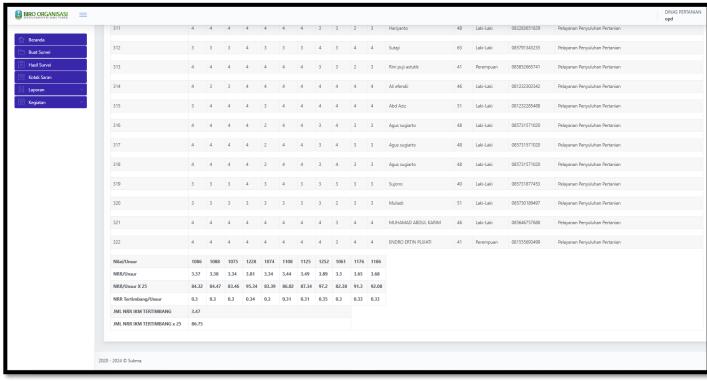


Sumber data: https://sukma.jatimprov.go.id/login

LAMPIRAN 2. HASIL OLAH DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO







LAMPIRAN 3. DOKUMENTASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO



Mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara elektronik Jawa Timur (SUKMA E JATIM)





Memasang Barcode dan Link Survei Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto



Pengguna layanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

LAPORAN

HASIL TINDAK LANJUT PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO PERIODE TAHUN 2023



DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO

Jalan RA Basuni Nomor 17 Sooko Mojokerto, 61361

BAB I PENDAHULUUAN

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Bagian Organisasi perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agar terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik secara terus menerus.

.

BAB II DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsure pelayanan seperti dapat terlihat pada table dibawah ini.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Mutu Layanan
1	Persyaratan	3,2	В
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,25	В
3	Waktu Penyelesaian	3,2	В
4	Biaya/Tarif	3,1	В
5	Produk, Spesifikasi dan Jenis Pelayanan	3,28	В
6	Kompetensi Pelaksana	3,25	В
7	Perilaku Pelaksana	3,28	В
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2,65	С
9	Saranan dan Prasarana	3,75	Α

Berdasar pada data diatas, terdapat beberapa unsur yang menjadi perhatian lanjutan karena rendahnya nilai pada unsur tersebut. Maka dari itu perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsure yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tab dibawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM Periode 2023

			Waktu	Penanggung			
No	Unsur	Program/Kegiatan		TW II	TW III	TW IV	Jawab
1	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Membuat kotak saran pengaduan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan provinsi jawa timur dalam bentuk web, media sosial, dan email				٧	Dinas Pertanian
2	Waktu penyelesaian	Membuat aplikasi untuk mengolah data pembayaran dan penerbitan hasil layanan secara elektronik				٧	Diskominfo
3	Biaya/ Tarif	Merevie kembali besaran tarif pelayanan				٧	Dinas Pertanian

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Realisasi Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM Periode 2023

No	Rencana Tindak Lanjut	RTL Telah Ditindak lanjuti (Sudah/ Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/ Hambatan
1	Membuat kotak saran pengaduan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan provinsi jawa timur dalam bentuk web, media sosial, dan email		Tersedianya aplikasi survei kepuasan masyarakat SuKMa- e Jatim yang terintegrasi dengan Provinsi Jawa Timur	POWE PETERS TO A CATEFOR	-
			Tersedianya media sosial Insatgram Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto		
2	Membuat aplikasi untuk mengolah data pembayaran dan penerbitan hasil layanan secara elektronik	Sudah	tersedianya aplikasi berbasis web yaitu e retribusi Lab. Keswan	© e-retribusi mojokertokab go.id/re ③ : © E Q © stamment 10 Lie Data Retread Control form Contr	-

	Mereviw kembali besaran pelayanan	arif Sudah	Berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah untuk memasukan usulan tarif pelayanan Dinas Pertanian yang baru ke dalam Rancangan Peraturan Daerag

BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

- 1. Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (realisasi tindak lanjut/jumlah tindak lanjut x 100)
 - $= 5 / 5 \times 100 \%$
 - = 100 %
- 2. Dinas Pertanian telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut yang masuk dalam skala prioritas perbaikan.
- 3. Guna memastikan rencana tindak lanjut tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya rencana tindak lanjut antara lain:

No	Rencana Tindak Lanjut	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1		kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaen	minggu sekali	Dinas Pertanian Kab. Mojokerto	Dinas Pertanian Kab. Mojokerto
2	_	pengembangan aplikasi e Retribusi Lab Keswan		Dinas Pertanian Kab. Mojokerto	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mojokerto
3	Merevie kembali besaran tarif pelayanan	mengusulkan perubahan tarif dalam Rancangan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023		Dinas Pertanian Kab. Mojokerto	Badan Pendapatan Daerah Kab. Mojokerto

Tabel 4. Strategi Penyelesaian Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2023